

Mengharap Pers Mahasiswa

Fajar Junaedi (@fajarjun)

1996, dua tahun sebelum kejatuhan pemerintahan Soeharto, seorang wartawan di Bantul, Yogyakarta dibunuh. Udin, nama wartawan tersebut. Nama lengkapnya Fuad Muhammad Syafrudin. Udin adalah wartawan harian Bernas, sebuah koran lokal yang terbit di Yogyakarta.

2014, 16 tahun setelah Soeharto jatuh. Tatanan sosio-politik pasca reformasi ternyata belum mampu mengungkap siapa sebenarnya pembunuh Udin. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta dan Peace and Conflict Journalism Network (Pecojon) Indonesia merilis sebuah film dokumenter yang didedikasikan untuk mengenang Udin. Film berjudul *The Years of Blur* (2014) ditayangkan kali pertama di hadapan audiens Kota Yogyakarta dan sekitarnya pada Sabtu, 3 Mei 2014.

Film ini mampu menggugah kembali ingatan publik tentang kasus kematian Udin. Kematian wartawan yang bisa terjadi pada wartawan-wartawan lain. Kekerasan yang dialami Udin, juga bisa menimpa siapa saja baik itu wartawan maupun bukan wartawan.

Kematian Udin yang tidak berhasil diungkap polisi jelas menjadi preseden buruk dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi ternyata masih menjadi macan kertas. Udin dibunuh karena berita yang ditulisnya mengenai kasus korupsi dan ketidakberesan lainnya yang terjadi di Bantul menjelang kejatuhan Orde Baru. Alasan ini diyakini oleh banyak pihak, terutama oleh kalangan aktivis dan pers. Di sisi yang berseberangan, polisi justru menyatakan bahwa tidak ada saksi dan bukti yang kuat oleh memecahkan kasus Udin. Dalam film *The Years of Blur*, Marsiyem – istri almarhum Udin – menyebutkan bahwa polisi justru selalu mengalihkan pembicaraan ketika pemeriksaan dengan isu di luar berita yang ditulis Udin. Isu itu adalah isu perempuan dan perselingkuhan. Kata polisi, sebagaimana disebutkan oleh Marsiyem, biasanya kasus pembunuhan disebabkan alasan tersebut di atas.

Kematian Udin adalah kematian berpendapat. Pembunuhan Udin adalah pembunuhan terhadap demokrasi. Kekerasan pada Udin adalah kekerasan pada pers. Kekerasan, pembunuhan dan kematian terhadap jurnalis yang dilakukan pihak-pihak lain memperlihatkan ketakutan para penjahat dan pembajak demokrasi terhadap tulisan jurnalis.. Kini, kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi berbagai tempat. Tercatat, menurut data AJI, terjadi kematian 7 jurnalis dalam tugas yang mereka, dengan dihitung dari peristiwa pembunuhan Udin.

Di masa Orde Baru, ancaman terhadap pers adalah represi yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga birokrasi dan militer. Rejim Orde Baru menerapkan aturan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers), sebuah peraturan di tingkat menteri yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan. Pers yang terbit wajib memiliki SIUPP. Jika mengkritik Orde Baru, SIUPP dicabut yang berarti matilah penerbitan pers tersebut. Kasus pencabutan

SIUPP terhadap tiga media cetak terkemuka, Tempo, Editor dan Detik yang terjadi di tahun 1994 menandai kejayaan rejim Orde Baru terhadap pers dan sekaligus mengawali kejatuhan Orde Baru. Alih-alih menyerah, para jurnalis pasca pembredelan 1994 menerbitkan media bawah tanah untuk terus menyuarakan kritik mereka. Kemajuan teknologi informasi berupa internet menumbuhkan *mailing list* yang menjadi media perlawanan, yang tidak terjangkau oleh regulasi SIUPP.

Pers mahasiswa menjadi garda terakhir lain yang digunakan untuk melawan tirani pada masa tersebut. Pers mahasiswa menyuarakan suara kritisnya pada situasi yang sedang berkembang. Melalui pers mahasiswa, perlawanan pada rejim dalam bentuk wacana dan teks berkembang.

Setelah Orde Baru jatuh, pemerintah melonggarkan regulasi represif yang berlaku di masa Orde Baru. SIUPP ditiadakan dan diberlakukan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang lebih demokratis. Namun bukan berarti ancaman pada kebebasan pers telah tiada. Kini pers dihadapkan pada ancaman dalam bentuk baru, yang setidaknya bisa dipetakan sebagai berikut. Pertama, masih ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dirugikan oleh pemberitaan media. Pembunuhan pada jurnalis masih terjadi pasca kematian wartawan Udin. Kedua, ancaman yang lebih bersifat halus dalam bentuk budaya amplop yang masih dilestarikan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Ketika konferensi pers dilakukan oleh lembaga pemerintah, disediakan amplop berisi uang pada jurnalis. Jelas ada politik transaksional dalam pemberitaan jika amplop diterima jurnalis. Ketiga, konglomerasi media yang berpusat pada pemilik media tertentu yang menguasai sejumlah besar media. Yang lebih parah terjadi ketika pemilik kelompok usaha media tersebut berlatar belakang non-jurnalis.

Kondisi seperti ini sebenarnya mendudukan pers mahasiswa dalam posisi dan peran yang signifikan. Pers mahasiswa terbebas dari konglomerasi. Mahasiswa dengan idealismenya yang membunyah kini sebenarnya lebih diuntungkan dari sisi teknologi. Perkembangan teknologi grafika, komunikasi dan informasi semakin memudahkan penerbitan pers mahasiswa, mulai dari pencarian berita, pengolahan berita, publikasi dan distribusi berita. Persoalannya sekarang adalah bagaimana mengelola sumberdaya manusia pers yang diterbitkan oleh mahasiswa di tengah sistem pendidikan yang diwarnai kultur apatisme.

* Makalah disampaikan untuk Pelatihan Pengembangan Blog Dan Media Komunikasi Part III dengan tema Pengembangan Kreativitas Dunia Media untuk pengembangan skill kader ikatan dalam menghadapi Gelombang Globalisasi Media, IMM AR Fahrudin UMY 4 Mei 2014.

** Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi UMY. Juga mengajar di UAJY, UKSW, UMS, UII, UMBY dan UIN Sunan Kalijaga. Pengurus pusat Asosiasi Pendidikan

Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM). Penulis buku Bonek : Komunitas Suporter Pertama dan terbesar di Indonesia, Menyulap Kekalahan : Operasi Militer Amerika dalam Film Hollywood, Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi, Komunikasi Politik : Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia, Komunikasi Multikultur : Melihat Multikulturalisme dalam Genggaman Media dan beberapa buku yang lain. Bukunya yang akan terbit tengah tahun ini berjudul Manajemen Media.